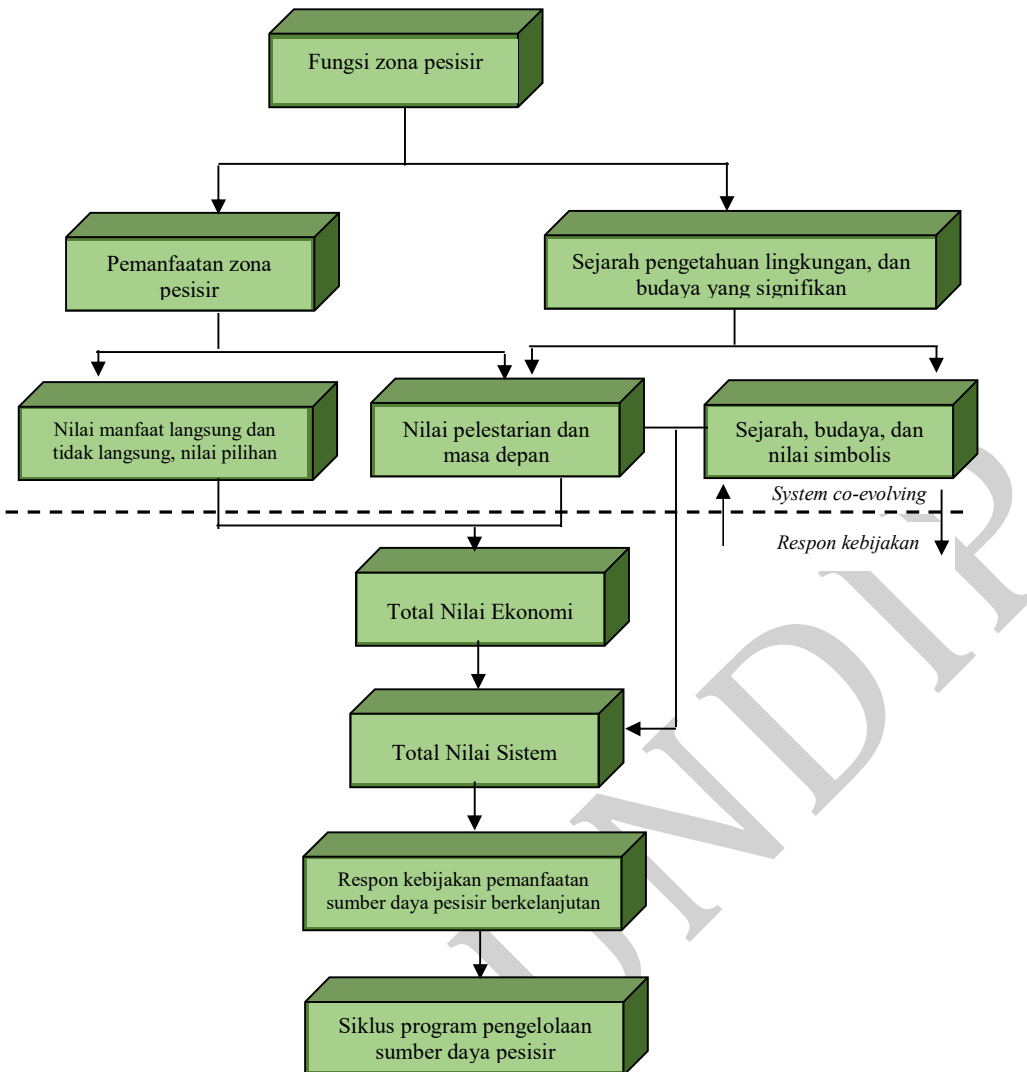


II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Valuasi Ekonomi dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir

Valuasi ekonomi merupakan upaya untuk memberikan nilai kuantitatif terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumberdaya alam dan lingkungan, baik atas dasar nilai pasar (*market value*) maupun nilai non-pasar (*non market value*) (Fauzi, 2004). Valuasi ekonomi sumberdaya merupakan suatu alat ekonomi (*economic tool*) yang menggunakan teknik penilaian tertentu untuk mengestimasi nilai uang dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumberdaya alam dan lingkungan. Pemahaman tentang konsep valuasi ekonomi memungkinkan para pengambil kebijakan dapat menentukan penggunaan sumberdaya alam dan lingkungan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, valuasi ekonomi dapat dijadikan alat yang penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan dan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan. Berbagai macam teknik yang dapat digunakan untuk mengkuantifikasi konsep nilai. Namun konsep dasar dalam penilaian ekonomi yang mendasari semua teknik adalah kesediaan untuk membayar dari individu untuk jasa-jasa lingkungan atau sumberdaya (Bateman et al., 2002).

Secara diagram, fungsi keterkaitan antara valuasi ekonomi dan pengelolaan sumberdaya pesisir secara berkelanjutan dapat dilihat pada Gambar 2.1. Berdasarkan Gambar 2.1 tersebut dapat dilihat bahwa sistem pengelolaan sumberdaya pesisir dimulai dari kerangka berpikir sistem sumberdaya pesisir (*coastal resources system*) yang memiliki struktur dan proses untuk menghasilkan fungsi manfaat baik yang terkait dengan pemanfaatan aktual langsung maupun tidak langsung (*use values*), maupun fungsi manfaat yang tidak terkait dengan pemanfaatan aktual (*non-use values*). Keseluruhan sistem nilai ini kemudian secara agregat menghasilkan total nilai ekonomi bagi sistem sumberdaya pesisir. Total nilai ekonomi ini merupakan input penting bagi kebijakan pengelolaan sumberdaya pesisir melalui proses interaksi antara *coevolving system* dan *policy responses* yang menghasilkan pemanfaatan sumberdaya pesisir secara berkelanjutan (*sustainable utilization of coastal resources*). Proses ini berjalan terus menerus dalam kerangka kebijakan program pengelolaan sumberdaya pesisir (*coastal management program cycles*).



Gambar 2.1 Keterkaitan antara valuasi ekonomi dan pengelolaan pesisir

Sumber: Ledoux and Turner, 2002

2.2 Contingent Valuation Method (CVM)

Nilai merupakan harga yang diberikan oleh seseorang terhadap sesuatu pada suatu tempat dan waktu tertentu. Nilai ekonomi didefinisikan sebagai pengukuran jumlah maksimum seseorang ingin mengorbankan barang dan jasa untuk memperoleh barang dan jasa lainnya. Secara formal, konsep ini disebut keinginan membayar (*willingness to pay*) seseorang terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumberdaya alam dan lingkungan (Fauzi, 2004), dengan menggunakan pengukuran ini, nilai ekologis dari ekosistem atau sumberdaya alam akan dapat diterjemahkan ke dalam bahasa ekonomi dengan mengukur nilai moneter dari barang atau jasa.

Keterkaitan antara alam dan manusia (produsen dan konsumen) dengan preferensi atau penghargaan manusia terhadap sumberdaya yang disediakan oleh alam sangat

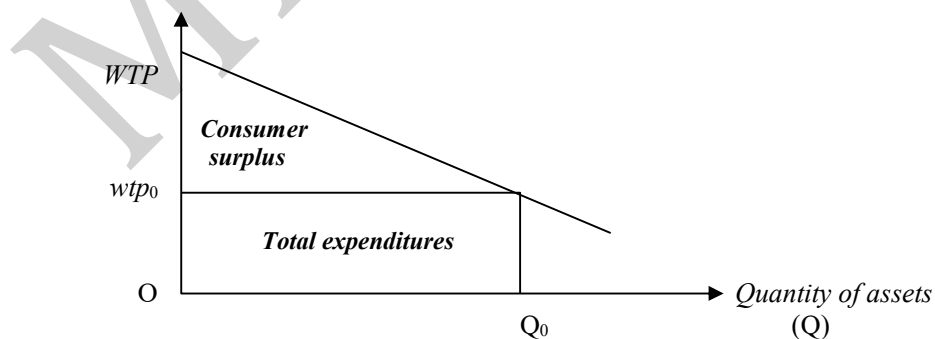
tergantung pada karakteristik sosial ekonomi manusia. CVM merupakan teknik preferensi yang paling banyak digunakan untuk memperkirakan nilai non-pasar. Pada mulanya metode ini diusulkan oleh Ciriacy dan Wantrup (1947) dan diimplementasikan oleh Davis (1963) dan Amirnejad, *et. al.* (2006). Mitchell dan Carson (1989) membuktikan bahwa CVM dapat memberikan perkiraan yang tepat untuk mengestimasi *WTP* jika dilakukan dengan benar.

CVM adalah metode berbasis survei dimana barang diperdagangkan dalam pasar yang dikonstruksikan atau dihipotetiskan. Oleh karena itu merancang kuesioner untuk survei memiliki peran yang sangat signifikan dalam CVM. CVM disebut *contingent* karena dalam metode ini, responden diminta untuk menyatakan kesediaan mereka untuk membayar (*WTP*) bergantung pada sifat pasar hipotetis. Kuesioner ini umumnya mencakup informasi rinci tentang skenario dari barang non-pasar, skenario hipotetis, serta skenario pasar yang dihipotetiskan. Dalam kuesioner juga dimasukkan pertanyaan tentang nilai-nilai lingkungan yang baik, sikap responden terhadap isu-isu lingkungan dan profil sosial ekonomi (Desvouges, *et. al.* 1998).

WTP sangat berkaitan dengan konsep kurva permintaan (Bateman et al., 2002). Dalam teori ekonomi ditunjukkan bahwa surplus konsumen merupakan ukuran dari manfaat/keuntungan bersih konsumen dalam membeli sejumlah barang/jasa pada harga pasar. Rumus dasar untuk WTP adalah sebagai berikut :

$$\text{Total WTP} = \text{Harga pasar} + \text{Surplus Konsumen}$$

dengan kata lain, *WTP* mengukur tingkat kesejahteraan/utiliti bruto dari perubahan kuantitas. Hal ini diilustrasikan pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2. Kurva Permintaan dan *Willingness-to-Pay* (*WTP*)

CVM dibandingkan dengan metode yang lain memiliki beberapa keunggulan. Salah satu keuntungan tersebut adalah realistis karena *CVM* merupakan pertanyaan yang mudah dipahami. *CVM* memberikan beban lebih rendah kepada responden jika dibandingkan dengan format pertanyaan *CVM* terbuka (Young, 2005). Namun, *CVM* membutuhkan ukuran sampel yang relatif besar karena membutuhkan pengamatan yang lebih dan analisis statistik untuk memperoleh nilai *WTP*. *CVM* juga memerlukan biaya yang lebih mahal karena harus mewawancarai dan mengumpulkan data yang relatif banyak dari responden untuk memperoleh tingkat estimasi *WTP* yang tepat (Mitchell dan Carson, 1989).

Jumlah informasi dalam *CVM* yang diberikan kepada responden memiliki efek penting pada penentuan *WTP* mereka. Masalah lain yang muncul dari *CVM* adalah pasar hipotetis dari *non-marketed good*. Beberapa peneliti (Bishop dan Heberlein, 1989; Johannesson, *et. al.* 1997; Getzner, 2000) menyatakan bahwa aspek pasar hipotetis secara signifikan mempengaruhi *WTP* responden. Meskipun *CVM* memberikan pendekatan yang penting dalam menilai sumber daya alam, tidak dapat dihindari dari kritik terutama yang berkaitan dengan reliabilitas, validitas, dan *error biases* (Cummings, *et. al.*, 1986).

2.3 Analisis Stakeholder

Para pihak terkait atau yang lazim dikenal dengan istilah *stakeholder* oleh Freeman (1984) didefinisikan sebagai pihak-pihak yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi (menerima dampak) dari keputusan yang diambil. Sementara Salam and Noguchi (2006) mendefinisikan *stakeholder* sebagai orang, kelompok atau lembaga yang memiliki perhatian dan/atau dapat mempengaruhi hasil suatu kegiatan. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *stakeholder* adalah semua pihak baik secara individu maupun kelompok yang dapat dipengaruhi dan mempengaruhi pengambilan keputusan serta pencapaian tujuan suatu kegiatan. Oleh karena itu, konsep pengelolaan sumberdaya perikanan skala kecil memerlukan partisipasi yang baik dari *stakeholder* yang terlibat.

Analisis *stakeholder* perlu dilakukan untuk menentukan pihak-pihak yang berkompeten dalam merumuskan suatu kebijakan. Schmeer (2000) menyatakan analisis ini merupakan proses sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi secara kualitatif dalam menentukan kepentingan siapa yang harus diperhitungkan ketika mengembangkan atau menerapkan suatu kebijakan. Setiap *stakeholder* memiliki pengaruh dan kepentingan dalam kebijakan pengembangan perikanan yang berkelanjutan.

Stakeholder yang memiliki kepentingan tinggi merupakan *stakeholder* primer dimana kepentingannya dipengaruhi secara langsung oleh kebijakan, sedangkan *stakeholder* sekunder, kepentingannya dipengaruhi secara tidak langsung (Arief et al., 2014), sedangkan menurut Townsley (1998), *stakeholder* primer adalah pihak yang memiliki kepentingan langsung dalam sumberdaya, baik sebagai mata pencaharian atau pihak yang terlibat langsung dalam eksploitasi. Sementara *stakeholder* sekunder adalah pihak yang memiliki minat/kepentingan secara tidak langsung, atau pihak yang tergantung pada sebagian kekayaan atau bisnis yang dihasilkan oleh sumberdaya.

Pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumberdaya alam memiliki kepentingan (*interest*) serta pengaruh (*power*) yang beragam, ada yang bersifat positif adapula yang bersifat negatif terhadap keberhasilan pengelolaan sumberdaya alam (Kadir, et al., 2013). Peranan masing-masing *stakeholder* dalam kaitannya dengan pengelolaan sumberdaya alam berdasarkan derajat kepentingan dan pengaruhnya dibagi menjadi 4 (empat) kuadran, yaitu Kuadran I (subjek), kuadran II (pemain), kuadran III (penonton), dan kuadran IV (aktor) (Marasabessy dan Najamudin, 2015). Temuan dari analisis *stakeholders* adalah merumuskan berbagai macam kebijakan yang harus diambil oleh masing-masing *stakeholders* dan interaksi antar *stakeholders*. Tahapan analisis *stakeholders* antara lain (Freeman, 1984):

- (1) Identifikasi pemangku kepentingan utama (primer) dan sekunder,
- (2) Karakteristik para pemangku kepentingan (kontribusi, ekspektasi, pengaruh, kekuatan).
- (3) Keputusan tentang strategi mana yang digunakan untuk mempengaruhi setiap pemangku kepentingan.

2.4 Pengelolaan Kawasan Pesisir

Wilayah pesisir adalah wilayah pertemuan antara daratan dan laut, ke arah darat meliputi bagian daratan yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut dan intrusi garam, sedangkan ke arah laut mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang ada di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar serta daerah yang dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan manusia di daratan, seperti penggundulan hutan dan pencemaran (Nontji, 2002; Carlos, 2011). Menurut UU No. 27 Tahun 2007, wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

Hal itu menunjukkan bahwa tidak ada garis batas yang nyata, sehingga batas wilayah pesisir hanyalah garis khayal yang letaknya ditentukan oleh situasi dan kondisi setempat. Definisi wilayah seperti diatas memberikan suatu pengertian bahwa ekosistem perairan pesisir merupakan ekosistem yang dinamis dan mempunyai kekayaan habitat beragam, di darat maupun di laut serta saling berinteraksi. Wilayah pesisir merupakan ekosistem yang mudah terkena dampak kegiatan manusia.

Terminologi pesisir dan pantai untuk memahami morfologi yang membedakan bagian daratan di pinggir laut, dalam bahasa Inggris disebut *shore* and *coast*. *Shore* atau pesisir ialah sejalur daerah tempat pertemuan daratan dengan laut, mulai dari batas permukaan laut ketika pasang surut terendah menuju ke arah darat sampai batas tertinggi yang mendapat pengaruh gelombang ketika terjadi badai. Jadi, daerah ini akan tergenang ketika pasang naik dan kering ketika sedang pasang surut. *Coast* atau pantai ialah suatu zona yang mendapat pengaruh kuat dari proses *marine* (*a zone in which coastal processes operate or have a strong influence*). Jadi, sebenarnya pesisir atau *shore* merupakan bagian dari pantai atau *coast*, hanya dibedakan atas dasar kondisinya yang dihubungkan dengan penggenangan oleh air laut saja.

Coast: adalah wilayah pantai yang kering atau disebut sebagai pesisir.

Shore: adalah wilayah pantai yang basah termasuk daerah pasang surut.

Menurut Bengen (2002), hingga saat ini masih belum ada definisi wilayah pesisir yang baku. Namun demikian, terdapat kesepakatan umum bahwa wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan. Apabila ditinjau dari garis pantai (*coast line*), maka wilayah pesisir mempunyai dua macam batas (*boundaries*) yaitu batas yang sejajar garis pantai (*long shore*) dan batas yang tegak lurus garis pantai (*cross shore*). Untuk kepentingan pengelolaan, batas ke arah darat suatu wilayah pesisir ditetapkan dalam dua macam, yaitu wilayah perencanaan (*planning zone*) dan batas untuk wilayah pengaturan (*regulation zone*) atau pengelolaan keseharian (*day to day management*). Batas wilayah perencanaan sebaiknya meliputi seluruh daerah daratan dimana terdapat kegiatan manusia (pembangunan) yang dapat menimbulkan dampak secara nyata terhadap lingkungan dan sumberdaya di wilayah pesisir dan lautan, sehingga batas wilayah perencanaan lebih luas dari wilayah pengaturan.

Pembangunan di pesisir yang merupakan suatu proses perubahan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, tidak terlepas dari aktivitas pemanfaatan sumberdaya alam pesisir dan laut. Aktivitas ini sering dilakukan perubahan pada sumberdaya alam sehingga memberikan pengaruh pada lingkungan. Semakin tinggi laju

pembangunan, maka semakin tinggi pula tingkat pemanfaatan sumberdaya alam dan perubahan yang terjadi pada lingkungan. Oleh karena itu, dalam perencanaan pembangunan sistem ekologi pesisir perlu diperhatikan kaidah ekologis yang berlaku untuk mengurangi akibat negatif yang merugikan bagi kelangsungan pembangunan itu sendiri (Bengen 2002). Beberapa bentuk pengelolaan kawasan pesisir yang telah dilakukan, diantaranya: (1) *Integrated coastal zone management*, (2) *Adaptive management*, (3) *Community based coastal resource management*, dan (4) *Ecosystem based management*.

2.4.1 *Integrated Coastal Zone Management*

Untuk dapat mewujudkan pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan, diperlukan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu (*integrated coastal zone management*). Pilihan ini didasarkan pada: (1) wilayah pesisir merupakan *multiple use zone*, didalamnya terdapat lebih dari dua macam sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan serta terdapat lebih dari dua macam pemanfaatan kawasan pesisir; (2) karakteristik dan dinamika alamiah sumberdaya pesisir dan lautan yang secara ekologis saling terkait satu sama lain termasuk dengan ekosistem lahan atas; (3) wilayah pesisir dihuni lebih dari satu kelompok etnis yang memiliki preferensi mata pencaharian yang berbeda. Pengelolaan pesisir dapat dilakukan oleh lembaga pemerintah, swasta, dan organisasi kemasyarakatan yang terlibat dalam kegiatan sehari-hari yang terjadi di wilayah pesisir.

Keseluruhan proses diatas menurut Sorensen dan McCreary (1990), harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan dinamis dengan mempertimbangkan segenap aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspirasi masyarakat pengguna kawasan pesisir dan lautan serta konflik pemanfaatan sumberdaya dan konflik pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan lautan yang mungkin ada. Keterpaduan pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan ini mencakup empat aspek (Dahuri, et al., 2001): (1) keterpaduan ekologis; (2) keterpaduan sektoral; (3) keterpaduan disiplin ilmu; dan (4) keterpaduan stakeholders.

Di Brazil dan Indonesia, ICM masih kurang efisien dan lemah dalam institusinya karena pengelolaan bersifat sentralistik dan partisipasi masyarakat masih kurang (Wever, 2012), sedangkan di Antigua dan Barbuda, potensi penerapan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu masih terkendala karena luasnya area yang dikelola dan munculnya konflik antara masyarakat dengan pemangku kepentingan (Ramsey, 2015). Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya maka penerapan ICM sulit untuk diterapkan.

2.4.2 Adaptive Management

Manajemen sumber daya yang adaptif menurut Walters and Holling (1990), mengacu pada proses pembelajaran terstruktur dengan melakukan secara langsung (*learning by doing*), dan beradaptasi berdasarkan apa yang telah dipelajari. Pembelajaran dalam manajemen adaptif terjadi melalui praktek manajemen yang informatif itu sendiri, strategi manajemen disesuaikan dengan peningkatan pemahaman untuk membangun kebijakan yang lebih tangguh dan kuat (*trial and error*). Manajemen adaptif menekankan pada aspek ekosistem daripada aspek hukum/kebijakan, menekankan pada populasi/masyarakat, bukan proyek individual, dan skala prioritas dan waktu merupakan skala biologis daripada siklus bisnis.

Aplikasi pembelajaran dan adaptasi yang berulang mengarah secara alami pada dua konsekuensi yang bermanfaat untuk: (1) meningkatkan pemahaman tentang sistem sumber daya, dan (2) peningkatan manajemen berdasarkan pemahaman itu (Williams, 2011). Lebih lanjut, Williams (2011) menjelaskan ada empat komponen dalam fase pengaturan elemen manajemen adaptif (pemangku kepentingan, tujuan, alternatif solusi, model, pemantauan) dan dua komponen dalam fase yang harus dilakukan berulang (pengambilan keputusan, pemantauan, dan penilaian). Penerapan *adaptive management* juga perlu didukung oleh peran gender untuk menentukan aktor kunci dalam pengelolaan sumber daya pesisir (Frocklin et al., 2013).

2.4.3 Community Based Coastal Resource Management

Pendapat Pomeroy (1995) mengenai pengelolaan berbasis masyarakat/PBM merupakan suatu proses pemberian wewenang, tanggungjawab, dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola sumberdayanya sendiri yang didahului dengan penentuan kebutuhan dan tujuan serta aspirasi. Masyarakat bertanggungjawab terhadap keputusan yang mereka ambil. Keputusan ini akan berpengaruh terhadap kesejahteraan hidup mereka. Menurut Hasani (2014), PBM didefinisikan sebagai strategi guna mencapai pembangunan yang bertumpu pada manusia, di mana masyarakat merupakan pusat dalam mengambil keputusan untuk mendayagunakan sumber daya yang ada di daerah mereka. Masyarakat terwakili dalam organisasi masyarakat yang disegani dan punya pengaruh kuat. Nantinya melalui organisasi tersebut, masyarakat menyalurkan aspirasi, kebutuhan dan tujuan pemanfaatan sumberdaya alam mereka. Mereka bertanggung jawab terhadap pengelolaan tersebut. Hasilnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena

itu, menurut Crawford et al., (2010) kepatuhan dan penegakan aturan terhadap pelanggaran pemanfaatan sumber daya pesisir harus dilakukan oleh masyarakat lokal sendiri, seperti yang terjadi di Kabupaten Minahasa.

Pengelolaan sumber daya pesisir berbasis masyarakat menunjukkan efisiensi pengelolaan sumber daya, namun juga memiliki beberapa kelemahan. Menurut Waluyo (2014), keuntungan dan kelemahan pengelolaan sumber daya pesisir berbasis masyarakat seperti pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Keuntungan dan Kelemahan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Berbasis Masyarakat

Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Berbasis Masyarakat	
Keuntungan	Kelemahan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mendorong keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam, 2. Mampu merefleksikan kebutuhan spesifik masyarakat setempat, 3. Mampu meningkatkan tunjangan lokal bagi seluruh anggota masyarakat, 4. Mampu meningkatkan efisiensi secara ekologi dan ekonomi, 5. Responsif dan efektif terhadap variasi kondisi sosial dan lingkungan setempat, 6. Masyarakat lokal termotivasi untuk mengelola sumber daya secara berkelanjutan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hanya dapat diterapkan dengan baik pada orang-orang dengan kondisi struktural masih sederhana dan skala/bidang aktivitasnya tidak luas, 2. Tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya lingkungan masih rendah, 3. Kurangnya mendapat dukungan, sehingga sulit untuk diimplementasikan, 4. Hanya efektif dibidang pengelolaan dengan batas geografis yang jelas dan terbatas, 5. Rentan terhadap intervensi eksternal dan ledakan permintaan terhadap sumber daya perikanan dan jasa lingkungan.

Sumber: Waluyo (2014)

2.4.4 *Ecosystem Based Management*

Pengelolaan berbasis ekosistem dikembangkan oleh Christensen et al. (1996); Slocombe (1998); McLeod et al. (2005) dalam Granet et al., (2010). Fokus EBM menurut Granet et al., (2010) adalah menekankan perlindungan struktur ekosistem, fungsi, dan proses dengan perhatian eksplisit pada keterkaitan antara sistem dan integrasi faktor ekologi, sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Pengelolaan pesisir berbasis ekosistem dapat gagal karena berbagai alasan termasuk kebuntuan politik dari kelompok yang mendapatkan manfaat berbeda dari ekosistem (misalnya, pengembangan pesisir, penangkapan ikan komersial, dan kepentingan konservasi), kurangnya institusi untuk pemerintahan yang efektif atau ilmu yang tidak memadai (Ostrom 1990; Hennessey 1994; Crowder et al. 2006 dalam Granet et al., 2010).

Pandangan dari berbagai kelompok pemangku kepentingan seharusnya dipertimbangkan dalam pengembangan rencana EBM. Proses partisipatif menyediakan forum untuk beragam individu dan kelompok untuk mengekspresikan dan mendiskusikan preferensi mereka dan untuk merancang solusi yang dapat dikerjakan untuk meminimalkan perselisihan. Langkah-langkah dalam pengelolaan sumber daya pesisir berbasis ekosistem menurut Granet et al., (2010) yaitu:

1. Identifikasi fungsi dan manfaat jasa lingkungan ekosistem pesisir,
2. Identifikasi institusi, hukum, peraturan, dan norma sosial yang ada di pesisir,
3. Penyamaan persepsi tujuan pengelolaan pesisir antara seluruh pemangku kepentingan yang terlibat,
4. Menghitung secara bersama-sama, manfaat ekosistem pesisir dengan memperkirakan nilai moneter jasa ekosistem. Perkiraan moneter (preferensi konsumen) dari nilai jasa ekosistem, untuk menghitung manfaat dan kerugian bagi berbagai kelompok,
5. Penyusunan kebijakan untuk pengambilan keputusan dan implementasinya,
6. Pemantauan dan pengelolaan yang adaptif terhadap implementasi kebijakan yang disusun.

2.5 Ekonomi Hijau (*Green Economy*)

Menurut (UNEP, 2012), ekonomi hijau (*green economy*) berbasis pada pengetahuan dan teknologi yang bertujuan melihat saling keterkaitan antara sumber daya manusia dengan sistem alam, dan meminimalkan dampak aktivitas ekonomi manusia terhadap perubahan iklim dan pemanasan global. Secara konseptual, ekonomi hijau adalah paradigma ekonomi yang menginternalisasi persoalan lingkungan dalam arsitektur sistem perekonomian, sehingga bukan hanya kemajuan fisik dan sosial saja yang dipertimbangkan tetapi juga aspek keberlanjutan ekologis.

Aspek keberlanjutan ekologis dipertimbangkan, karena manusia pada hakekatnya berkehidupan atas dasar adaptasi dan berstrategis secara fungsional dengan lingkungan alamnya. Kehidupan manusia dengan lingkungan adalah suatu struktur yang bersifat dualitas dan fungsional. Ekonomi hijau menjamin pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, mewujudkan keadilan sosial tidak saja antar masyarakat dalam satu generasi tetapi juga antar generasi (Budimanta, 2011).

Pada ekosistem pesisir dan laut, harmonisasi kegiatan ekonomi tradisional dan nilai ekonomi yang bergantung pada ekosistem adalah sebuah tantangan yang harus ditangani. Menghijaukan ekonomi biru tidak hanya terjadi pada aspek lingkungan, namun

sangat penting jika masyarakat menemukan cara mempertahankan tiga modal pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaannya yaitu: modal ekonomi, modal sosial, dan modal lingkungan (UNEP, 2012). Terdapat sepuluh prinsip ekonomi hijau menurut Djajadiningrat, et al., (2014), yaitu:

1. Mengutamakan nilai guna, nilai intrinsik, dan kualitas,
2. Mengikuti aliran alam,
3. Sampah adalah makanan (*zero waste*),
4. Rapih dan keragaman fungsi,
5. Skala tepat guna/skala keterkaitan,
6. Keanekaragaman,
7. Kemampuan diri, organisasi diri dan rancangan diri,
8. Partisipasi dan demokrasi,
9. Kreativitas dan pengembangan masyarakat,
10. Peran strategis dalam lingkungan buatan, lanskap, dan perancangan spasial.

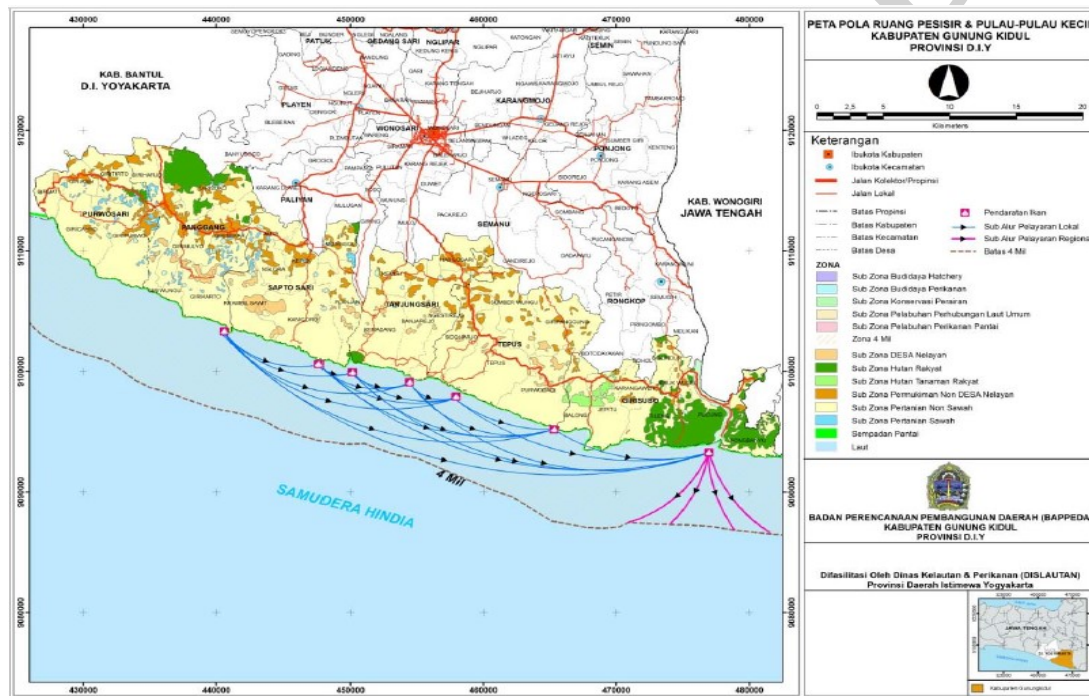
2.6 Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta

Kabupaten Gunungkidul berada di bagian tenggara dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), berjarak 40 km dari Kota Yogyakarta. Wilayah Kabupaten Gunungkidul terletak antara 7° 46' - 8° 09' Lintang Selatan dan 110° 21' - 110° 50' Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Gunungkidul tercatat 1.485,36 Km² yang meliputi 18 kecamatan dan 144 desa/kelurahan. Kawasan pesisir Kabupaten Gunungkidul membentang sepanjang garis pantai 71 km, dengan luas wilayah daratan 32.277 Ha dan luas perairan 257.790 Ha. Kawasan pesisir Kabupaten Gunungkidul terdiri dari 6 kecamatan (Kecamatan Panggang, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Tepus, Kecamatan Tanjungsari, dan Kecamatan Girusubo) dan 35 desa kecamatan pesisir. Batas-batas wilayah Kabupaten Gunungkidul, sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo
- Sebelah Timur : Kabupaten Wonogiri
- Sebelah Selatan : Samudra Indonesia
- Sebelah Barat : Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman.

Pemerintah Daerah Propinsi D.I. Yogyakarta melalui Perda No. 16 Tahun 2011 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2011-2030 menetapkan pembagian zona di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

termasuk di Kabupaten Gunungkidul. Rencana zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumberdaya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin. Berdasarkan Perda No. 16 Tahun 2011, Bab V Rencana Pola Ruang Pesisir Pasal 47 terlihat bahwa terdapat pembagian ruang wilayah pesisir Kabupaten Gunungkidul untuk kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, kawasan strategis nasional tertentu; dan/atau alur laut (Gambar 2.3).



Gambar 2.3 Pola Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta

Sumber: Bappeda Provinsi D.I.Yogyakarta, 2011b

2.7 Penelitian Terdahulu

Penyusunan penelitian “Strategi pengelolaan kawasan pesisir menuju ekonomi hijau di Kabupaten Gunungkidul, D.I.Y” memperhatikan *willingness to pay* (WTP) sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi utiliti pengelolaan kawasan pesisir yang berkelanjutan di Kabupaten Gunungkidul, sehingga dapat menemukan paradigma baru dalam pengelolaan kawasan pesisir yang lebih seimbang, rasional, dan optimal. Beberapa penelitian terdahulu dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/ Penulis, Tahun	Judul	Metodologi/ Alat analisis	Temuan
1	Kontogianni, et al., (2001)	<i>Integrating stakeholder analysis in non-market valuation of environmental assets</i>	<i>Mix methods (CVM, FGD)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan skenario-skenario dalam pengelolaan Kalloni bay, Yunani. Responden diminta berpartisipasi dan memberikan WTP terkait pelestarian lingkungan. • Pendapatan, pendidikan, umur, jenis kelamin, organisasi pecinta alam, pekerjaan, <i>aware</i> berpengaruh positif terhadap <i>WTP</i> pengelolaan Kalloni bay wetland. • Mix method antara CVM dan FGD menjelaskan preferensi ekonomi dan kebijakan baru pengelolaan sumber daya alam untuk pembuat kebijakan.
2	Rockloff and Stewart (2004)	<i>Participatory tools for coastal zone management: Use of stakeholder analysis and social mapping in Australia</i>	Pendekatan partisipatif dan pemetaan sosial.	Keberhasilan analisis pemangku kepentingan dan pemetaan sosial menggunakan alat partisipatif untuk mendokumentasikan dan memberi umpan balik berupa nilai, minat, sikap, dan aspirasi para pemangku kepentingan, serta memahami konflik pemangku kepentingan.
3	Reed, et al (2009)	<i>Who's in and why? A typology of stakeholder analysis methods for natural resource management</i>	Analisis stakeholder dengan pendekatan partisipatif.	Analisis <i>stakeholders</i> dapat mengarah pada desain strategi dan proses yang lebih banyak, secara efektif mewakili dan melibatkan para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan.
4	Halkos and Matsiori (2012)	<i>Determinants of willingness to pay for coastal zone quality improvement</i>	CVM	Pendapatan, usia, jenis kelamin, aktivitas rekreasi pesisir, dan kualitas lingkungan pesisir berpengaruh positif terhadap WTP masyarakat dalam peningkatan kualitas zona pesisir di Yunani Tengah (Volos).
5	Abernethy, et al.(2014)	<i>Two steps forward, two steps back: The role of innovation in transforming towards community based marine resource management in Solomon Islands.</i>	Pendekatan inovasi CBM	Penentuan status keberhasilan CBM.
6	Ramsey	<i>Integrated Coastal</i>	Deskriptif	Pengelolaan perikanan masih

No	Peneliti/ Penulis, Tahun	Judul	Metodologi/ Alat analisis	Temuan
	(2015)	<i>Management and its potential application to Antigua and Barbuda</i>	ICZM	terkendala dengan luas area dan konflik.
7	Lopes, et al. (2015)	<i>Fisheries, tourism, and marine protected areas: Conflicting or synergistic interactions?</i>	Deskriptif	Pengelolaan MPA masih perlu pengembangan untuk penyelesaian konflik pada nelayan dan sektor terkait lainnya.
8	Muliawan, et al. (2014)	Analisis <i>stakeholders</i> pada perikanan tangkap kerapu, preliminary studi menuju implementasi <i>ecosystem approach for fisheries management</i> di Kepulauan Spermonde Kota Makassar	Analisis <i>stakeholder</i> dan analisis hubungan entitas <i>socio-ecological system (SES)</i>	Kelompok <i>stakeholder</i> primer merupakan kelompok yang harus dilibatkan secara aktif dengan berdialog dua arah menuju implementasi EAFM di Kepulauan Spermonde Kota Makassar.
9	Kirana, et al. (2016)	<i>The innovation of vulnerable fisheries using ecosystem based fishery management approach: a test case in Karimunjawa ecosystem, Central Java, Indonesia.</i>	Mix-method (EBFM)	Pengelolaan EBFM berdasarkan pada keseluruhan aspek ekosistem, biologi, manusia, dan lingkungan.
10	Tsabiq, et al. (2018)	Pembuatan peta zona nilai ekonomi kawasan dan analisis nilai ekonomi kawasan melalui teknik valuasi <i>travel cost method</i> dan <i>contingent valuation method</i> (studi kasus: kawasan wisata pantai alam indah, Kota Tegal)	TCM CVM	<ul style="list-style-type: none"> • WTP (<i>Willingness to Pay</i>) Wisata Pantai Alam Indah sebesar Rp 140.344.795. • Pendapatan berpengaruh positif terhadap WTP wisata Pantai Alam Indah. • Variabel keberadaan, manfaat, kepentingan, dan partisipasi memberikan hasil uji yang <i>reliable</i>.

Sumber: Dari berbagai sumber diolah (2018)

2.8 Hipotesis

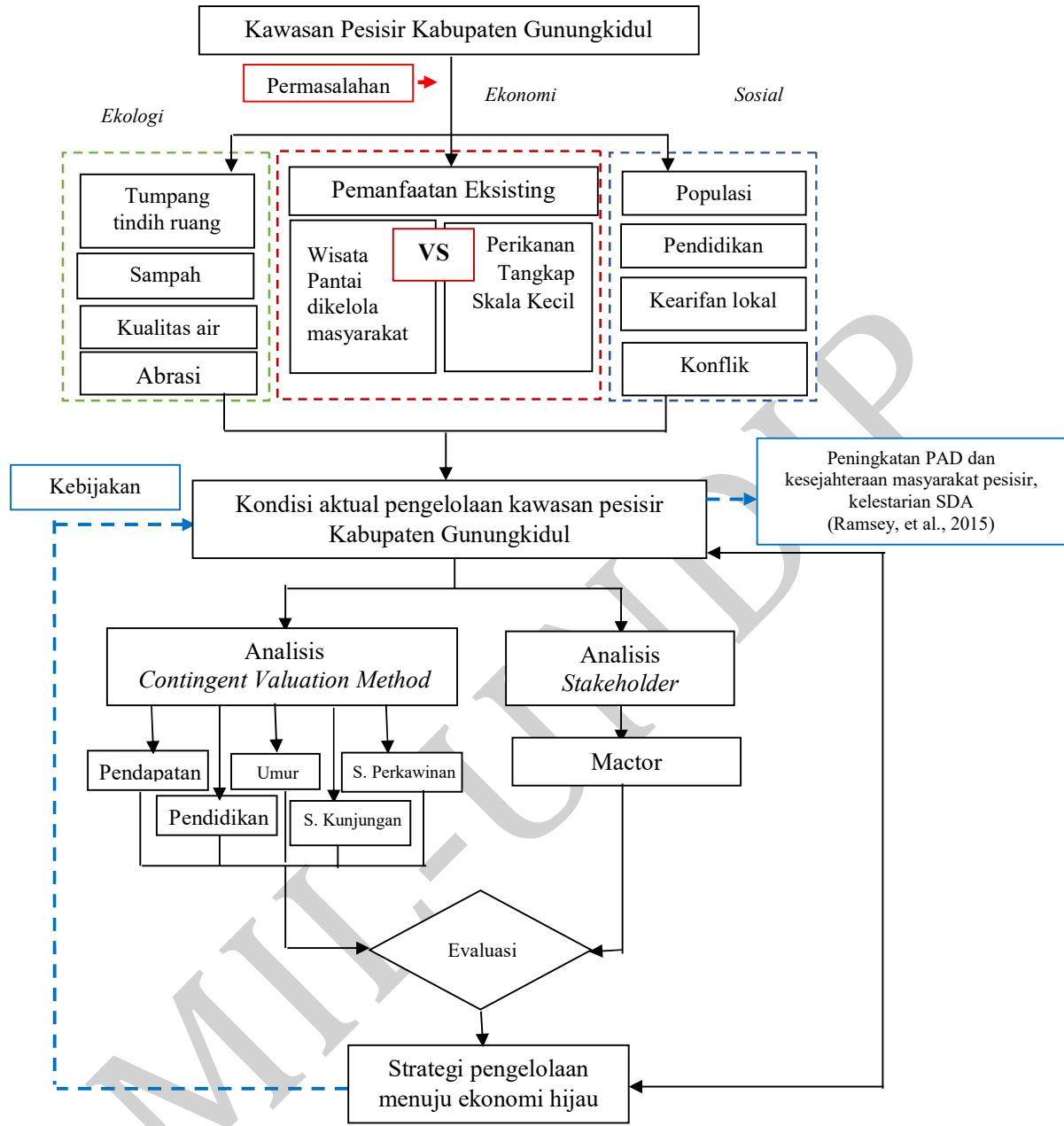
Menurut Sugiyono (2011), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori. Menyatakan hipotesis sebagai praduga atau asumsi yang harus diuji melalui data atau fakta yang diperoleh dengan jalan penelitian Dantes (2012). Berdasarkan kajian teoritis di atas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Diduga program kebijakan pengelolaan kawasan pesisir di Kabupaten Gunungkidul memberikan dampak sosial dan ekonomi masyarakat pesisir, serta lingkungan kawasan pesisir.
2. Diduga penekanan utama kebijakan pengelolaan kawasan pesisir di Kabupaten Gunungkidul pada aspek penataan ruang kawasan pesisir akan berdampak pada sosial dan ekonomi masyarakat pesisir, serta lingkungan kawasan pesisir.

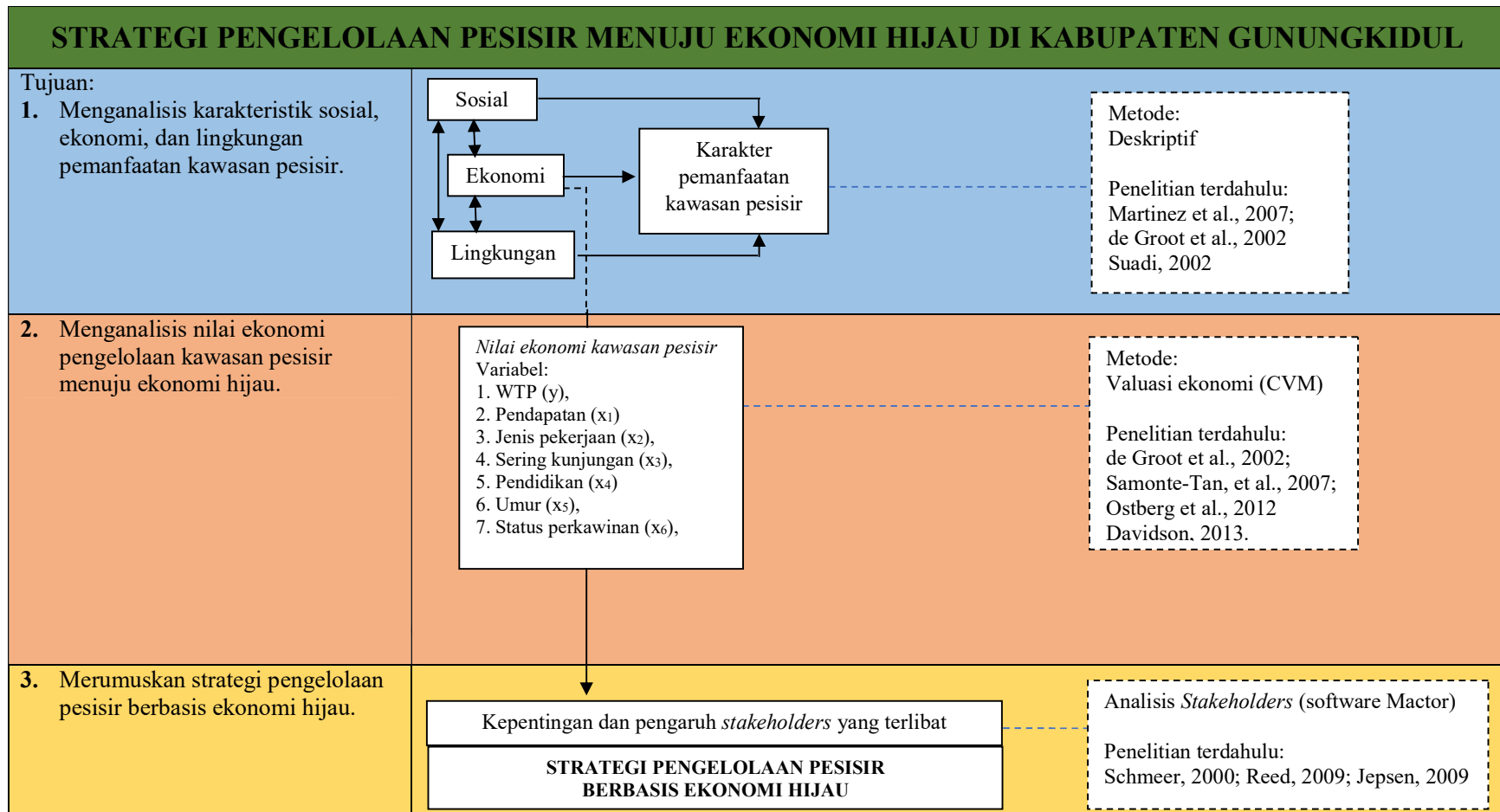
3. Diduga terdapat hubungan antara peran *stakeholders* yang disebabkan oleh pengaruh dan kepentingan *stakeholders* dengan partisipasi masyarakat dan wisatawan dalam program kebijakan pengelolaan kawasan pesisir di Kabupaten Gunungkidul
4. Diduga terdapat hubungan antara peran *stakeholders* yang disebabkan oleh pengaruh dan kepentingan *stakeholders* dengan partisipasi masyarakat dan wisatawan dalam program pengelolaan kawasan pesisir di Kabupaten Gunungkidul.

2.9 Kerangka Pikir dan *Roadmap* Penelitian

Pengelolaan kawasan pesisir menuju ekonomi hijau di Kabupaten Gunungkidul dapat diketahui dengan terlebih dahulu melakukan menanalisis karakteristik pemanfaatan eksisting pada aspek ekonomi, sosial, ekologi, dan masalah yang timbul terkait pemanfaatan kawasan pesisir. Penilaian ekologi mencakup identifikasi dan analisis karakteristik kesesuaian ruang, kondisi persampahan, dan kualitas perairan, serta kondisi pemanfaatannya. Penilaian ekonomi dilakukan untuk menganalisis seberapa besar *willingness to pay* dan nilai ekonomi masyarakat lokal dan pengunjung kawasan pesisir dalam pengelolaan kawasan pesisir menggunakan *contingent valuation method*. Penilaian sosial mencakup identifikasi dan analisis karakteristik populasi, tingkat pendidikan, kearifan lokal, dan konflik yang timbul dari pemanfaatan kawasan pesisir. Hasil analisis nilai pemanfaatan eksisting dan potensi pemanfaatan yang masih dapat dikembangkan selanjutnya dikombinasi menggunakan analisis *stakeholders* untuk mengetahui kepentingan dan pengaruh *stakeholders* yang terlibat. Berdasarkan hasil identifikasi karakteristik pemanfaatan kawasan pesisir, dan nilai ekonomi serta adanya kesenjangan kepentingan dan pengaruh *stakeholders* yang terlibat maka selanjutnya disusun strategi pengelolaan kawasan pesisir Kabupaten Gunungkidul menuju ekonomi hijau di masa yang akan datang. Kerangka pemikiran pengelolaan kawasan pesisir menuju ekonomi hijau di Kabupaten Gunungkidul seperti pada Gambar 2.4 dan roadmap penelitian disajikan pada Gambar 2.5.



Gambar 2.4 Kerangka Pikir Penelitian



Gambar 2.5 Roadmap Penelitian

MIL-UNDIP